

*impeachment* (permakzulan). Institusi yang terlibat dalam proses ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bertindak sebagai pengusul, kemudian Mahkamah Konstitusi RI yang bertindak sebagai pihak pembukti dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertindak sebagai pengambil keputusan akhir melalui Sidang Istimewa.

- b. Bahwa pemberhentian Soekarno sebagai Presiden Republik Di Indonesia sebelumnya belum diatur secara gamblang dalam bentuk undang-undang. Alasan pemberhentian ini lebih banyak dikarenakan persoalan politis setelah pidato pertanggungjawabanya (NAWAKSARA) ditolak oleh MPRS. Kekuatan yang mengikat atas peristiwa ini didasarkan oleh TAP MPRS dan sama sekali tidak melibatkan pihak pengadilan untuk membuktikan tentang kesalahan-kesalahannya. Sedangkan Presiden Abdurrahmad Wahid diberhentikan atas dalih pelanggaran UUD 1945 langsung melalui Sidang Istimewa MPR tanpa mekanisme pembuktian di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Alrasyid, Harun, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Black Carles L., 1998, *Impeachment, a Hand Book.*, Yale University Press, New Haven and London
- Budiarjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fadjar, Mukthie, 2003, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Intrans, Malang.
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* Jakarta: Timun Mas, 1955
- Hamdan Zoelva, 2005, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie, 2000, *"Impeachment dan Sumpah Jabatan"*, Jakarta: Konstitusi Press
- Kusnadi, Moh. A Bintang R. Saragih, 1989, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Lijphart, Arind, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2003, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono & Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1977, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- Strong, CF, 1960, *Modern Political Constitution*, Sigdwich & Jackson Ltd., London.

Wheare, KC, 1975, *Modern Constitution*, London, Oxford University Press.

### TESIS

Muhammad Ilham Hermawan, "Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia (Studi Perbandingan Konstitusi Beberapa Negara)", Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Indarwati, Pemberhentian Presiden (Impeachment) dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia, Tesis, Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, 2005

### Surat Kabar

Denny Indrayana, *Problematika Konstitusi Pemberhentian Presiden*, Kompas, 8 September 2004.

Mulyosudarmo, Suwoto, *Harian Kompas*, 14 Juli 2001.

### *Online Resourches*

[www.oefre.unibe.ch/law](http://www.oefre.unibe.ch/law)

## RIWAYAT PENULIS

### **PROF. H. A. MUKTHIE FADJAR, SH. MS**

*(Mohon diambilkan dari data di Setjend MK) dan ditambah keterangan bahwa beliau adalah Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur*

### **DR. H. LUKMAN HAKIM, SH. MH.**

Adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang bidang keahlian Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UWG sejak tahun 1998 hingga tahun 2006. Pendidikan S1 di Universitas Brawijaya, S2 di Universitas Padjajaran, dan S3 di Universitas Brawijaya. Pernah menjadi Ketua Tim Hukum Universitas Widyagama. Penelitian terakhir adalah tentang Pelembagaan Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Email: lukman\_cri@yahoo.co.id

### **DR. FATKHUROHMAN, SH.MH**

Dilahirkan 41 tahun silam tepat di dataran rendah kota panas Ngawi Jawa Timur di kaki timur Gunung Lawu dan di kaki barat Gunung Wilis. Pekerjaan sebagai pengajar dilakoninya sejak tahun 1993 pada Fakultas Hukum dan Program

Pascasarjana program studi Magister Hukum Universitas Widyagama Malang. Secara struktural duduk sebagai Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Penggiat Pusat Pengkajian Konstitusi (Puskasi) di Universitas yang sama. Sedangkan tugas sosial akademik diabdikan secara insidental sebagai pengisi tetap pada acara penyuluhan hukum dan konstitusi pada Radio Republik Indonesia, Radio Mas FM, Radio Makobu FM, Radio Andalus FM serta pada TV Lokal, Batu TV dan Dharma TV. Beberapa karya ilmiah berupa Penelitian, Pengabdian Masyarakat, buku dan jurnal yang menjadi tugas primer akademik juga selalu dilakukan. E-mail kusumo\_uwg@yahoo.co.id.

### **DR. SIRAJUDDIN, SH.MH**

adalah dosen dan Peneliti pada Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Univ. Widyagama Malang. Dilahirkan di Pungkit Sumbawa pada Tanggal 22 Agustus 1975. Pendidikan dasar sampai menengah diselesaikan di Sumbawa, pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan pada Fakultas Hukum Univ. Widyagama Malang tahun 1997, sedangkan gelar Magister Hukum diperoleh dari Program Pasca sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2000, gelar Doktordiperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Penulis telah menulis beberapa karya ilmiah berupa buku antara lain : (1) Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diterbitkan

Yappika dan MCW tahun 2007; (2) Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa diterbitkan Citra Aditya Bakti Bandung, dan beberapa judul Buku yang diterbitkan oleh Penerbit di Malang

**AGUS SUDARYANTO, SH. MH.**

Lahir di Cilacap, 13 Desember 1967. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Jawa Tengah, S2 di Univ. Diponegoro Semarang, dan saat ini sedang menempuh program S3 di Universitas Brawijaya. Sehari-hari mengabdikan sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang untuk beberapa mata kuliah bidang Hukum Pidana dan Kriminologi.

Aktif meneliti tentang Eksaminasi Publik dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa, serta masalah Kejahatan Korporasi dan pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. Selain aktif mengajar, juga sering memberikan keterangan ahli dalam beberapa kasus di Polresta Malang. Berpengalaman melakukan eksaminasi publik diantaranya pada kasus korupsi di Lumajang, kasus Pollicapus dalam kasus Pembunuhan Munir, dan lain-lain.

**DR. ANWAR C., SH., MHum**

Dr. Anwar, SH., MHum, lahir di Pinrang (Sul-Sel), 31 Desember 1965, memperoleh

Sarjana Hukum Tata Negara UNHAS Th. 1990, Magister Hukum Tata Negara Univ. Padjadjaran Bandung (UNPAD) Th. 1998, dan Doktor Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara Univ. Padjadjaran Bandung Th. 2007. Sejak 1992 diangkat sebagai dosen tetap PNS DPK pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Tahun 1999-2002 menjadi Pembantu Dekan Bidang kemahasiswaan (PD III) Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, dan sejak bulan Maret 2007 sampai sekarang dipercaya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang. Buku yang sudah dipublikasikan berjudul "Teori dan Hukum Konstitusi", diterbitkan oleh In-Trans Publishing Malang Tahun 2008.

#### **LULUK SALEH, SH. CN.**

Adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang. Lahir di Malang pada 12 Juli 63 tahun yang lalu. Pendidikan Sarjana Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan program Kenotariatan (S2) di selesaikan di Universitas Air Langga. Beberapa tahun terakhir aktif melakukan penelitian diantaranya tentang "Peran dan Keberadaan Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan Indonesia", Penelitian Dosen Muda (ketua peneliti), Maret 2006; Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan leh Isteri, Penelitian Dosen Muda (Anggota) tahun 2007 dan 2009. Selain mengajar juga aktif melayani konsultasi hukum dan advokasi non-litigasi pada masyarakat di Malang Raya dan sekitarnya.

**PURNAWAN DWIKORA NEGARA, SH. MH.**

Dilahirkan di Surabaya tanggal 25 Oktober 1965, saat ini mengabdikan sebagai Dosen Tetap Dpk PNS pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang sejak tahun 1991. Pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Blitar Jawa Timur mulai 1973 hingga 1985, selanjutnya melanjutkan studi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus tahun 1991. Sedangkan gelar Magister Hukum diperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP Semarang Tahun 2008. Saat ini kembali menimba ilmu di program Doktorat Ilmu Hukum UNDIP Semarang. *e-mail* : p-dwikanegara@indo.nrt.id,

**DRS. MIFTACHUS SJUHAD, SH. MH.**

Lahir di Malang tanggal 3 April 1950. Sejak tahun 1991 menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang. Riwayat pendidikan dasar dan menengah dimulai dari SDN 3 Gadang, SMP Wachid Hasyim dan SMAN 3 Malang. Tahun 1969 lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan Pascasarjana Ilmu Hukum diselesaikan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang.



## KETENTUAN PENULISAN *JURNAL KONSTITUSI*

*Jurnal konstitusi* adalah salah satu media persemester yang diterbitkan oleh sekretariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan pusat kajian Konstitusi sebagai upaya mempublikasikan ide dan gagasan mengenai hukum, konstitusi dan isu-isu ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi* ditunjukkan bagi pakar dan akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan LSM serta pemerhati dan penggiat hukum dan konstitusi serta masalah ketatanegaraan.

Sebagaimana jurnal pada umumnya, *Jurnal Konstitusi* tampil pada format ilmiah sebuah jurnal sehingga tulisan yang dikirim untuk dimuat hendaknya memenuhi ketentuan tulisan ilmiah. Untuk memudahkan koreksi naskah, diharapkan tulisan catatan kaki (*footnote*) mengikuti ketentuan:

1. Emmanuel Subangun, *Negara Anarkhi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 64-65.
2. Tresna, *Komentara HIR*, Cetakan Ketujuhbelas, (Jakarta: PT Pradnya PArmita, 2001), hlm. 208-209
3. Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, terjemahan dari *De Structuur der Rechtswetenschap*, alih bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm 7
4. "Jumlah BUMN Diciutkan jadi 50", *Republika*, 19 Oktober 2005
5. Prijono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005

Sedangkan untuk penulisan Daftar Pustaka sebagai berikut:

1. Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
2. Burchi, Stefano. 1989. "Current Developments and Trends in

Water Resources Legislation and Administration” Paper Presented at the 3<sup>rd</sup> Conferences of The International Association for Water Law (AIDA) Alicante, Spain: AIDA, December 11-14

3. Jamin, Moh. 2005. “Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, volume 2 Nomor 1, Juli 2005, Jakarta: Mahkamah Konstitusi
4. Indonesia, *Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
5. *Republika*, “ Jumlah BUMN Diciutkan jadi 50”, *Republika*, 19 Oktober 2005
6. Tjiptoherijanto, Prijono. “Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia”, <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005

Kami menerima tulisan, artikel kajian ilmiah dan/atau hasil penelitian yang berbobot mengenai masalah ketatanegaraan, hukum, dan konstitusi, serta isu hukum di daerah. Secara khusus setiap edisi kami menyajikan tema sesuai hasil rapat redaksi berdasarkan isu yang berkembang yang berkaitan dengan isu hukum di daerah, wacana hukum ketatanegaraan dan konstitusi, serta hasil penelitian hukum dan konstitusi.

Tulisan dilampiri dengan biodata serta alamat email. Tulisan dikirim langsung atau via email ke alamat: [zulkarnain@widyagama.ac.id](mailto:zulkarnain@widyagama.ac.id).